

**POTENSI DAN PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR
DI KALIMANTAN BARAT
POTENCY AND PROBLEMS OF COASTAL REGION DEVELOPMENT IN WEST BORNEO**

Jajat Sudrajat

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura.
Jl. A.Yani, Pontianak. Email: sudrajat_jajat83@yahoo.co.id

ABSTRACT

The development of coastal region in West Borneo have basic problem, that is: first, many household are still poor. The second, there is deterioration of environmental quality. This conceptual study is intended to describe some problems of coastal region development and also try to formulate alternative strategy which can be done. Although its natural resources is very rich which is indicated by slope slightly of coastal and type of land is enough fertile, but some classical problems still occur, that is: a) still many communities are isolated, and b) social structure of community indicated to social polarization (two class community). Based on these features, so that some development strategy can be formulated, that is: (1) for isolated rural communities, the development strategy which can be done, is combine the participative and welfare strategy, and (2) for coastal rural, is suggested to do comprehensive strategy which is combine three development strategy, that is growth, welfare, and participative strategy. To increase income of fisherman needs to diversification source of income, not only on fisheries and agriculture but also non farm sector.

Keywords: coastal region, development, development strategy

ABSTRAK

Pembangunan wilayah pesisir di Kalimantan Barat menghadapi problematika mendasar, yaitu: pertama, banyaknya penduduk miskin pada kawasan ini. Kedua, semakin parahnya kerusakan lingkungan hidup. Kajian konseptual ini dimaksudkan untuk mencoba menguraikan berbagai masalah dalam pembangunan masyarakat pesisir dan juga mencoba merumuskan arahan strategi yang dapat dilakukan. Meskipun sumberdaya alamnya sangat kaya yang dicirikan oleh bentuk pantainya yang landai serta jenis lahan pesisir yang cukup subur, namun berbagai masalah klasik masih menimpa kawasan ini, yaitu: a) masih banyaknya komunitas/desa yang terisolasi, dan b) struktur sosial masyarakatnya yang mengarah pada terjadinya polarisasi sosial (masyarakat desa dua kelas). Berdasarkan pada karakteristik tersebut, maka beberapa alternatif strategi pembangunan yang dapat dilakukan, adalah: (1) untuk desa terisolasi, disarankan dengan mengkombinasikan antara strategi partisipatif dengan strategi kesejahteraan, dan (2) untuk desa pantai, hendaknya menerapkan strategi terpadu yakni memadukan antara strategi: pertumbuhan, kesejahteraan, dan partisipatif. Untuk meningkatkan pendapatan nelayan perlu dilakukan penganeekaragaman sumber pendapatan, tidak hanya terbatas pada sektor kelautan dan pertanian semata, tetapi juga mencakup sektor non pertanian.

Kata kunci: wilayah pesisir, pembangunan, strategi pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pesisir dalam konteks lokal Kalimantan Barat menghadapi tantangan mendasar berkaitan dengan karakteristik sosial ekonomi maupun sumberdaya alam dasar yang dimilikinya. Namun, apabila tantangan tersebut mampu disiasati dan dijadikan motivasi atau peluang, maka bukan mustahil tujuan pembangunan secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat direalisasikan. Tantangan pembangunan tersebut meliputi: (a) upaya penanggulangan kemiskinan yang masih banyak menimpa masyarakat nelayan, (b) peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir, dan (c) pengendalian masalah lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas ekonomi di wilayah pesisir maupun wilayah daratan. Ketiga tantangan tersebut meskipun tampak terpisah, tetapi sesungguhnya sangat berkaitan satu sama lain. Ketidakberdayaan menghadapi satu tantangan dapat menyebabkan semakin sulitnya menghadapi tantangan pembangunan yang lainnya.

Dilihat dari ragam aktivitas ekonomi di kawasan pesisir Kalimantan Barat sesungguhnya sudah cukup berkembang pesat jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman. Hal ini seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi di wilayah perkotaan yang pada umumnya berdekatan dengan wilayah pesisir. Namun demikian dilihat dari sisi pembangunan wilayah, kawasan pesisir ini seringkali dijadikan sebagai wilayah pinggiran (*periphery*) dari suatu wilayah perkotaan yang ada didekatnya. Meskipun kedua wilayah tersebut berhubungan secara fungsional dengan derajat integrasi antara komponen-komponen wilayah yang ada di dalamnya, namun karena strategi pembangunan yang salah urus pada masa sebelumnya tidak jarang hal ini malah menimbulkan ketimpangan hasil pembangunan antara kedua wilayah dimaksud. Pada akhirnya wilayah pesisir dengan segala komponen sumberdaya yang ada di dalamnya banyak dijadikan penyangga bagi kaum miskin yang tidak mampu bersaing di wilayah perkotaan. Kemiskinan di wilayah pesisir ini selanjutnya dapat mendorong kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah lagi, yang apabila tidak segera dikendalikan sesungguhnya dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Menelusuri tingkat kerusakan lingkungan hidup, menurut *World Bank* wilayah pesisir Kalimantan Barat telah mengalami tingkat pencemaran sedang, yakni lebih baik dari wilayah pesisir Jawa dan sebagian Pulau Sumatera yang telah mengalami tingkat pencemaran tinggi, namun lebih buruk dari kondisi wilayah pesisir Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur yang masih mengalami tingkat pencemaran rendah (Nugroho dan Dahuri, 2004). Degradasi lingkungan hidup di kawasan pesisir, secara umum didorong oleh beberapa faktor, yaitu: a) besarnya angka kemiskinan, b) peningkatan urbanisasi dan industrialisasi, c) eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam pesisir, d) peningkatan aktivitas intensifikasi pertanian terutama penggunaan pupuk, pestisida, dan herbisida, dan e) adanya berbagai aktivitas menyangkut kepentingan regional maupun global (King and Adeel, 2002). Kerusakan lingkungan hidup tersebut, bukan tidak mungkin pula akan sangat cepat sehingga menyerupai keadaan di pesisir Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Untuk mencegah degradasi lingkungan hidup tersebut, pertanyaan yang relevan diajukan sebagai lingkup analisis dalam telaah ini, adalah: a) Peningkatan aktivitas ekonomi apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, b) Pendekatan apa saja yang harus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, sehingga kegiatan ekonomi dan lingkungan hidup dapat dijamin keberlanjutannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sangat perlu dikenali secara dini berbagai karakteristik dan problematikanya. Tulisan ini dimaksudkan untuk mencoba menguraikan berbagai potensi dan

problematika dalam pembangunan masyarakat pesisir di Kalimantan Barat serta mencoba memberikan arahan terhadap kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan.

ANALISIS

Potensi dan Problematika Sumberdaya Alam

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan oleh masyarakat Kalimantan Barat sudah dilakukan sejak awal perkembangan peradaban di wilayah ini. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya kota-kota di wilayah pesisir. Wilayah pesisir Kalimantan Barat ini memiliki panjang pantai sekitar 1300 km, yaitu menghadap ke Selat Karimata dan Laut Natuna serta berbatasan dengan Propinsi Riau, Sumatera (Gambar 1). Panjang pantai ini kurang lebih sama dengan pantai utara Pulau Jawa. Pada wilayah pesisir ini, juga terdapat pulau-pulau kecil maupun besar yang berjumlah sekitar 140 buah. Karakteristik sumberdaya alam lainnya adalah ditandai oleh bentuk pantai yang landai. Bentuk pantai yang demikian itu, menurut Ismail (2000) biasanya memiliki jenis batuan alas yang relatif lunak dan stabil dari kegiatan tektonik, namun memiliki kerentanan terhadap kerusakan berupa pengikisan akibat gempuran ombak maupun pengendapan. Pada sisi lainnya, memiliki potensi berupa lahan yang cukup subur untuk pengembangan sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar lahannya didominasi oleh jenis tanah alluvial dan gambut. Oleh karena itu pada beberapa lokasi di sepanjang pantai Kalimantan Barat telah dibudidayakan tanaman pangan khususnya padi sawah dan tanaman perkebunan, meskipun pengelolaannya belum optimal. Untuk padi sawah produktivitasnya masih relatif rendah yaitu baru mencapai 1-1,8 ton/ha. Padahal potensinya bisa mencapai 6 ton/ha (Suyadi dan Sudrajat, 2009).

Berdasarkan pada pemanfaatannya, tipologi wilayah pesisir Kalimantan Barat dapat dikelompokkan pada empat kategori, yaitu: (a) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha pertanian rakyat dan perkebunan, (b) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha perikanan tangkap (daerah kepulauan), (c) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha nelayan dan tambak, dan (d) tipologi wilayah yang sumberdaya ekonomi lokalnya didominasi oleh usaha jasa, perdagangan, dan transportasi. Berpijak dari tipologi wilayah tersebut, maka ekosistem pesisir Kalimantan Barat setidaknya terdiri dari tiga karakteristik utama, yaitu: ekosistem yang didominasi hutan mangrove, ekosistem daerah pertanian atau perkebunan, dan ekosistem kepulauan. Luas hutan mangrove mencapai sekitar 472.386,8 hektar, yang tersebar hampir merata pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kubu Raya, dan Ketapang. Ekosistem pertanian umumnya didominasi oleh aktivitas pertanian tanaman pangan yaitu padi sawah pada lahan rawa pasang surut dan perkebunan Kelapa Dalam atau Karet. Tetapi dalam dekade terakhir ini, telah berkembang pula tanaman perkebunan kelapa sawit seiring dengan perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Pulau Kalimantan.



Gambar 1. Peta Wilayah Pesisir Kalimantan Barat (Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2002).

Potensi dan Problematika Sosial - Ekonomi

Masyarakat pesisir di Kalimantan Barat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (a) berupa masyarakat desa yang masih merupakan representasi dari komunitas desa terisolasi, dan (b) merupakan komunitas desa pantai yang sudah lebih terbuka untuk berinteraksi dengan desa disekitarnya. Komunitas desa terisolasi pada umumnya mendiami pulau – pulau kecil dengan aksesibilitas yang masih terbatas. Adapun komunitas desa pantai umumnya mendiami pesisir pantai yang menyatu dan banyak berinteraksi dengan masyarakat desa petani bahkan masyarakat perkotaan yang ada di sekitarnya. Pembagian masyarakat desa pantai seperti ini secara sosiologis menurut Satria (2002) sesungguhnya berada dalam suatu garis kontinum yang menempatkan komunitas desa terisolasi pada ujung sebelah kiri dan komunitas desa pantai pada ujung kanan. Menurut Redfield komunitas desa terisolasi memiliki karakteristik: (1) *mempunyai identitas yang khas*, (2) *jumlah penduduk terbatas sehingga dapat saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian*, (3) *bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas*, dan (4) *kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar luar*, sedangkan masyarakat desa pantai ditandai dengan telah mengalami pengenduran keempat ciri tersebut (Satria, 2002).

Lebih jauh, menelusuri karakteristik sosial masyarakat nelayan dapat juga dilihat dari pengetahuannya maupun perilaku transendentalnya. Pada masyarakat nelayan, pengetahuan tentang teknik penangkapan ikan umumnya didapat dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang selanjutnya menjadi salah satu faktor penyebab terjaminnya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Dengan kata lain, pengetahuan tradisional nelayan terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi, namun karena belum dilengkapi pengetahuan modern tentang dunia luar, maka kebanyakan nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dibandingkan masyarakat miskin lainnya. Cukup banyak pengetahuan tradisional masyarakat nelayan yang bersifat positif yang dapat dikembangkan, seperti

pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan musim ikan, tingkah laku organisme laut dan berbagai keterampilan tradisional.

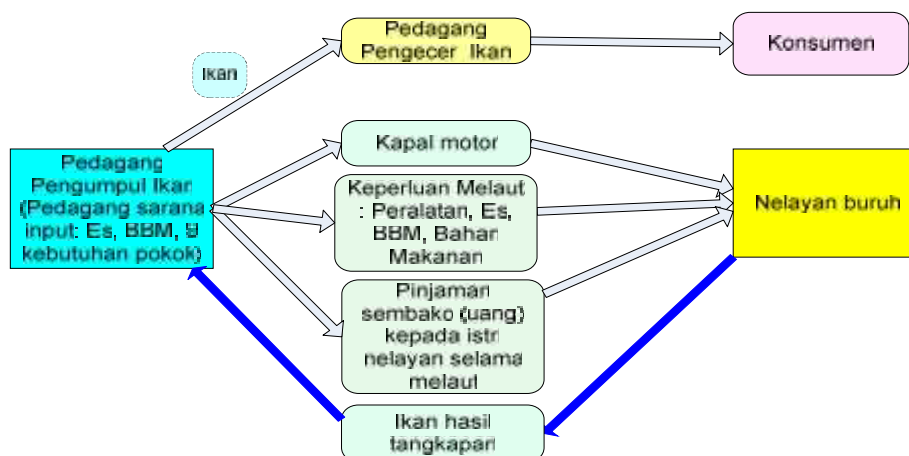
Berangkat dari pengetahuan tradisional tersebut, secara teologis ternyata nelayan yang berada di kepulauan masih memiliki kepercayaan yang kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis sehingga mereka mempercayai perlunya perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut menurut laporan Crescent (2001) antara lain terlihat pada masyarakat di Pulau Maya Karimata, yakni terdapatnya peranan “Dukun Laut” dalam mengadakan pesta laut yang diadakan setahun sekali (setiap bulan maret pada hari jum’at) dengan membuat miniature perahu layar yang di dalamnya berisi gambar orang sebanyak tiga orang, ketupat, uang logam dan mengadakan doa selamat, kemudian dibuang ke laut. Pada hari itu terdapat larangan untuk melaut dan apabila ada orang yang melanggarnya akan didenda dengan membuat 1000 biji ketupat. Pesta laut ini dimaksudkan untuk memohon keselamatan para nelayan. Dukun Laut selain berjasa dalam mempersiapkan upacara-upacara adat juga memberikan pengobatan apabila ada orang sakit karena gangguan di laut. Belum diketahui bagaimana peranan dari Dukun Laut ini secara lebih luas misalnya pengaturan alat tangkap bagi nelayan, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penyelesaian konflik diantara nelayan. Namun demikian, keberadaan Dukun Laut ini dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) atau wahana dalam pengorganisasian masyarakat nelayan untuk tujuan perlindungan sumberdaya pesisir dan laut. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam pengorganisasian Dukun Laut ini, misalnya dengan dilengkapi wakil, sekretaris, dan bendahara untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan seperti masalah perkreditan nelayan, teknologi produksi, dll. selain Dukun Laut, di Pulau Karimata juga dikenal Dukun Darat. Dukun Darat ini mengatur dan memimpin upacara-upacara adat untuk keselamatan apabila ada orang yang membuka ladang di hutan dan apabila ada masalah dalam komunitas.

Hal penting lainnya adalah status sosial nelayan baik secara kultural maupun struktural. Kondisi ini perlu dicermati karena pada kebanyakan masyarakat, ternyata nelayan memiliki status sosial yang relatif rendah. Menurut Pollnac (1988), rendahnya posisi sosial nelayan adalah akibat keterasingan. Keterasingan tersebut terjadi karena aspek geografis serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk interaksi dengan masyarakat lain. Dengan demikian, nelayan mengalami dua macam keterasingan yaitu keterasingan tempat tinggal dan keterasingan sosial. Keterasingan tempat tinggal dan sosial ini akan mempengaruhi variabel sosial dan budaya yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula pembangunan masyarakatnya. Hal inilah yang mendukung rendahnya tingkat pendidikan kebanyakan nelayan kecil. Keterasingan tempat tinggal mungkin dapat mudah diatasi, tetapi keterasingan sosial dapat mengakibatkan nelayan dan keluarganya membentuk sikap negatif terhadap pendidikan formal yang ada pada masyarakat bukan nelayan. Potensi sosial yang ada pada masyarakat nelayan adalah dalam hal sifat kerjasama dan solidaritas yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat petani. Hubungan sosial diantara nelayan dapat diamati dari kegiatan penangkapan ikan yang memerlukan koordinasi diantara para awak dalam menghadapi resiko fisik lingkungan laut, hal ini akan menanamkan pentingnya kerjasama yang erat diantara nelayan.

Pada sisi lainnya, perilaku ekonomi nelayan sangat berbeda dibandingkan perilaku ekonomi petani. Petani dalam kehidupan ekonominya telah terbiasa melakukan perencanaan dan pengorganisasian usahatani, mulai dari menyiapkan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen, hingga pasca panen. Sebaliknya pada masyarakat nelayan jarang melakukan perencanaan yang bersifat detil, kecuali hanya sedikit saja dalam persiapan

teknis penangkapan ikan yang menjadi buruannya. Bertolak dari perbedaan tersebut, berimplikasi pada perbedaan perilaku diantara keduanya. Apabila petani sudah terbiasa dengan pola pendapatan yang teratur, maka nelayan sebaliknya justru terbiasa dengan pendapatan yang tidak teratur. Tidak berhenti sampai di sini, tetapi berimplikasi pula pada perilaku konsumsinya, yakni masyarakat nelayan ini cenderung lebih bersifat konsumtif ketika hasil tangkapan berlimpah. Perilaku seperti ini, menurut Nadjib (2001) dikarenakan pola pendapatan nelayan tidak pasti tadi, sehingga sewaktu hasil tangkapan sedang baik, maka nelayan merasa dapat memperoleh uang dengan mudah, akibatnya pada waktu demikian cenderung boros.

Problematika paling utama dalam masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kalimantan Barat adalah berkaitan dengan struktur sosialnya yang cenderung mengarah pada terjadinya polarisasi sosial (struktur masyarakat desa dua kelas). Masyarakat desa tipe dua kelas ini, secara garis besar digambarkan sebagai desa nelayan yang di dalamnya terdapat sejumlah kecil warga yang memiliki alat produksi dan sumberdaya keuangan yang cukup banyak, dan selebihnya, dalam jumlah besar, merupakan nelayan kecil yang tidak memiliki alat produksi dan sumberdaya keuangan. Akibat dari terjadinya polarisasi sosial seperti ini, berdasarkan hasil penelitian Febrianto dan Rahardjo (2005) mengakibatkan terjadinya ketergantungan yang sangat kuat bahkan eksploitasi, nelayan kecil kemudian terjebak pada kemiskinan dan mendorong terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah. Terjadinya polarisasi sosial seperti ini mengisyaratkan telah terjadinya kemandegan (stagnasi) atau bahkan keterbelakangan (Rahardjo, 2010). Di wilayah pesisir Kalimantan Barat, struktur yang demikian itu sangat jelas, nelayan kecil yang berlatar belakang etnik melayu dan etnik lokal lainnya berperan sebagai anggota masyarakat desa kelas bawah, memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap alat produksi penangkapan ikan yang dimiliki sekelompok kecil masyarakat kelas atas yang pada umumnya beretnik Tionghoa. Peran masyarakat kelas atas ini sangat dominan, tidak hanya sebagai pemilik alat produksi penangkapan ikan, melainkan pula sebagai pedagang pengumpul ikan dan pedagang berbagai kebutuhan rumah tangga nelayan yang hidup disekitarnya. Secara skematik, hubungan antar pelaku dalam struktur sosial masyarakat desa nelayan tersebut dapat diilustrasikan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Skema Hubungan Antar Pelaku dalam Penangkapan Ikan (Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, 2002)

Karakteristik ekonomi masyarakat pesisir Kalimantan Barat tidak banyak berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris di wilayah pedalaman, perbedaannya pada dasarnya hanya berkaitan dengan sumberdaya yang dihadapi. Pada masyarakat nelayan di wilayah pesisir harus berhadapan dengan sumberdaya yang hingga saat ini masih bersifat *open access*. Berhadapan dengan karakteristik sumberdaya yang seperti itu menyebabkan nelayan harus berpindah-pindah untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal. Dengan demikian, elemen resikonya menjadi sangat tinggi.

Menghadapi elemen resiko yang demikian itu, tidak sedikit nelayan yang merangkap sebagai petani. Di wilayah pesisir Kalimantan Barat, pekerjaan rangkap seperti itu dapat dilakukan karena ditunjang oleh kondisi ekosistem yang memang memungkinkan, seperti tersedianya areal lahan persawahan di sekitar pantai. Aspek lainnya yang mendorong hal ini adalah karakteristik usaha nelayan yang tergantung kepada musim. Pada musim penangkapan, para nelayan sangat sibuk melaut, sebaliknya pada musim paceklik (ombak besar) kegiatan melaut menjadi berkurang, pada saat ini mereka memanfaatkan untuk bertani. Jadi ada musim tertentu bagi nelayan untuk turun ke sawah dan ada pula bagi mereka untuk kembali melaut. Pekerjaan rangkap seperti itu merupakan bagian dari pola adaptasi masyarakat pesisir Kalimantan Barat terhadap kondisi ekosistem yang mereka hadapi. Ketergantungan kepada musim ini semakin besar bagi nelayan kecil yang tidak mampu mengakses terhadap teknologi penangkapan.

Terjadinya pekerjaan rangkap ini, selain menandakan besarnya resiko yang dihadapi nelayan dalam menjamin keberlanjutan nafkah, juga mengindikasikan kecilnya pendapatan dari setiap sumber pendapatan yang dimiliki. Oleh karena itu, sangatlah rasional bagi rumah tangga miskin di perdesaan memiliki pekerjaan yang lebih variatif, sebagai sebuah strategi nafkah yang harus dijalankan. Hasil penelitian di Kabupaten Bangkalan Pulau Madura, strategi nafkah yang dilakukan rumah tangga nelayan tersebut, mencakup: pola nafkah ganda, pemanfaatan tenaga kerja rumah tangga, dan melakukan migrasi (Widodo, 2011).

Berlangsungnya pekerjaan rangkap ini, tidak terlepas dari peranan wanita. Aktivitas ekonomi wanita merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tidak terkecuali wanita yang berstatus sebagai istri nelayan. Umumnya selain banyak bergelut dalam urusan domestik rumah tangga, istri nelayan tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi rumah tangga seperti bekerja di sawah, berkebun, beternak, melakukan penangkapan ikan di perairan dangkal, pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Peran wanita ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi rumah tangga nelayan, karena pria mungkin hanya menangkap ikan pada musim tertentu saja, sementara wanita bekerja sepanjang tahun. Jadi dapat dikemukakan bahwa salah satu strategi adaptasi yang dapat ditempuh rumah tangga nelayan dalam mengatasi kesulitan ekonomi adalah dengan mendorong istri mereka mencari nafkah. Kiprah istri nelayan ternyata tidak hanya sebatas aspek domestik dan ekonomi semata, tetapi juga lebih aktif dari pria dalam menumbuhkan pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial komunitas nelayan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya peranan wanita pada acara pengajian, arisan, serta kegiatan simpan pinjam yang berperan besar dalam membantu penghasilan nelayan yang tidak pasti. Dengan demikian, peran sosial dan ekonomi istri nelayan tersebut tidak dapat dipandang kecil dan oleh karena itu, sudah sepatutnya senantiasa dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap perencanaan program pembangunan yang ditujukan pada masyarakat pesisir. Beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di Kalimantan Barat tersebut dapat dilihat dalam jenis komoditi dominan yang telah diusahakan, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ragam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Kalimantan Barat.

No	Kecamatan Pesisir	% Penduduk yang Bekerja di Sektor Perikanan	Komoditi Pertanian Dominan
1	Paloh	4,39	Padi, Karet
2	Teluk Keramat	0,59	Padi, Kelapa
3	Jawai	21,18	Padi, Kelapa
4	Pemangkat	1,49	Padi, Kelapa
5	Selakau	2,77	Padi, Kelapa
6	Singkawang	1,43	Padi, kelapa
7	Sungai Raya	9,27	Padi, Kelapa, Lada
8	Mempawah Hilir	4,89	Padi, Kelapa
9	Sungai Kunyit	9,51	Padi, Kelapa
10	Sungai Pinyuh	2,29	Padi, Kelapa
11	Siantan	3,08	Padi, Kelapa
12	Kakap	3,95	Padi, Kelapa
13	Teluk Pakedai	17,73	Padi, Kelapa
14	Kubu	7,35	Padi
15	Batu Ampar	11,32	Padi, Kelapa
16	Teluk Batang	1,48	Padi, Kelapa
17	Pulau Maya Karimata	20,71	Kelapa
18	Simpang Hilir	5,37	Padi, Karet, Kelapa
19	Sukadana	2,96	Padi, Kelapa, Sapi
20	Matan Hilir Utara	4,66	Padi, Karet, Kelapa
21	Matan Hilir Selatan	8,25	Padi, Kelapa, Sapi
22	Kendawangan	7,52	Padi, Sapi

Sumber : Kalimantan Barat dalam Angka 2012.

Zona Pengelolaan dan Arahan Alternatif Strategi Pembangunan

Potensi pesisir Kalimantan Barat yang termasuk ke dalam wilayah Indonesia bagian barat sesungguhnya cukup potensial, mengingat masih banyak sumberdaya yang dapat didayagunakan dan hingga saat ini belum optimal dimanfaatkan. Namun demikian, dalam pemanfaatan wilayah pesisir ini perlu pula mempertimbangkan masalah sosial-ekonomi dan biogeofisik pesisir di Kalimantan Barat yang sangat berlainan dengan kondisi pantai dan bahari di Indonesia Timur. Pada Indonesia bagian timur jumlah masyarakat nelayannya relatif sedikit dan tersebar padahal potensi perikanan lautnya tertinggi di Indonesia, sedangkan di wilayah pesisir Kalimantan Barat sudah didiami masyarakat dengan jumlah yang cukup padat. Kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan pesisir Kalimantan Barat yaitu antara 5 jiwa/km² sampai dengan 377 jiwa/km², kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Ketapang. Disamping itu kondisi pantai yang relatif landai dengan ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut dan cukup banyaknya daerah aliran sungai (DAS) seperti DAS Paloh, DAS Sambas, DAS Kapuas, DAS Pawan, dan DAS Kendawangan akan membawa implikasi dalam pengelolaan wilayah pesisir yang harus memiliki model tersendiri demi menjaga kelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, paling tidak kawasan pesisir Kalimantan Barat tersebut perlu dibagi ke dalam delapan sub kawasan (*cluster*) pesisir, yang pengelompokkannya didasarkan kepada terdapatnya aspek DAS yang menonjol, kedekatan wilayah, atau ada tidaknya keunikan aspek diversitas ekosistem (lihat Tabel 2).

Tabel 2. Sub-sub Kawasan Pesisir Kalimantan Barat Sebagai Zona Pengelolaan.

Sub Kawasan (Cluster)	Wilayah Administratif Kecamatan	Dasar Pengelompokkan
I	Paloh, Teluk Keramat	Lokasi berdekatan dan berada di hilir DAS Paloh
II	Jawai, Pemangkat, Selakau	Lokasi berdekatan dan berada di hilir DAS Paloh
III	Singkawang Utara, Singkawang Selatan, Sungai Raya, Sungai Kunyit, Mempawah Hilir, Pinyuh	Lokasi berdekatan serta memiliki ekosistem kepulauan
IV	Siantan, Kakap, Teluk Pakedai	Lokasi berdekatan dan berada di hilir DAS Kapuas
V	Kubu, Batu Ampar	Kaya diversitas ekosistem hutan mangrove
VI	Pulau Maya Karimata, Teluk Batang, Sukadana, Simpang Hilir	Lokasi berdekatan serta memiliki ekosistem kepulauan
VII	Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan	Lokasi berdekatan dan berada di hilir DAS Pawan
VIII	Kendawangan	Berada di hilir DAS Kendawangan

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Barat (2002).

Selanjutnya dalam pembangunan masyarakatnya, disebabkan wilayah ini telah dihuni oleh penduduk yang relatif padat serta memiliki karakteristik sosial ekonomi sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka pengembangan wilayah pesisir dan perlindungan ekosistem pantai jangan hanya dipandang dari aspek perikanan semata tetapi juga semua potensi pesisir seperti aspek jasa lingkungan, pertanian pangan, perkebunan, argoforesy, peternakan, bahkan sektor non pertanian. Sub-sub kawasan pesisir Kalimantan Barat ada yang memiliki potensi terhadap pertanian tanaman pangan (padi pasang surut), perkebunan seperti lada dan karet, dan peternakan seperti itik dan sapi. Disamping itu, untuk menstabilkan kondisi ekosistem pesisir maka perlindungan lingkungan pesisir menjadi agenda yang sangat penting, antara lain mencakup perlindungan hutan mangrove yang masih ada maupun merehabilitasi yang telah mengalami kerusakan dan perlindungan daerah-daerah aliran sungai di wilayah daratan.

Lebih jauh dilihat dari pandangan yang lebih makro, mengingat kecilnya pendapatan yang diperoleh dari berbagai sektor pertanian yang ada di wilayah pesisir tersebut, peningkatan kesejahteraan nelayan jangan hanya mengandalkan pada hasil usahatani atau perikanan saja, tetapi perlu pula dibuka peluang pendapatan pada sektor non pertanian. Cara pandang seperti ini menempatkan pembangunan pertanian tidak terpisahkan dari pembangunan perdesaan dalam arti luas. Hal ini selaras dengan pemikiran Harianto (2007), bahwa faktanya memang jumlah rumah tangga perdesaan di Indonesia yang sebagian terbesar pendapatannya bersumber dari pertanian hanyalah sekitar 16 persen, oleh karena itu untuk petani/nelayan miskin di perdesaan berbagai peluang ekonomi tersebut perlu lebih dianekaragamkan dan tidak hanya bergantung pada ekonomi usahatani semata.

Pada sisi lainnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, masalah yang secara umum menimpa masyarakat pesisir adalah masih banyaknya rumah tangga (nelayan) yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan mungkin sudah

sering dilakukan, namun demikian sering pula tidak menghasilkan perubahan yang cukup berarti. Hal ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan seringkali kurang tepat berdasarkan pada kebutuhan nelayan. Pada banyak kasus, nelayan sebagai pihak yang menghadapi kesulitan hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dibela, bukan sebagai orang yang harus membela kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan nelayan tidak hanya cukup dengan melakukan advokasi, tetapi hendaknya melalui suatu proses pemberdayaan yang sesungguhnya. Berkaitan dengan hal ini, secara teoritik, pada dasarnya terdapat empat jenis strategi yang dapat dilakukan untuk membangun masyarakat nelayan, yaitu: a) strategi pertumbuhan, b) strategi kesejahteraan, c) strategi partisipatif, dan d) strategi terpadu.

Untuk memberdayakan masyarakat pesisir di Kalimantan Barat dapat dengan menerapkan strategi pertumbuhan, mengingat sumberdaya alam di wilayah pesisir memiliki banyak potensi tidak hanya pada perikanan tangkap namun juga pada sektor pertanian tanaman pangan, seperti padi sawah dan sayuran, peternakan, pengolahan hasil perikanan, dll. Strategi pertumbuhan umumnya diarahkan kepada peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat melalui peningkatan produksi dan produktivitas. Untuk mendukung strategi ini maka dipersyaratkan adanya dukungan teknologi (inovasi) yang dapat diterapkan dan dukungan permodalan dari lembaga kredit. Tersedianya skim perkreditan yang dapat diakses oleh nelayan menjadi suatu hal yang sangat penting berkaitan dengan upaya melakukan perubahan terhadap struktur sosial yang cenderung mengarah pada polarisasi sosial. Struktur seperti itu menurut penelitian Susilo (2010) hanya dapat berubah apabila ada masuknya unsur-unsur pembentuk struktur dari luar. Keberadaan lembaga pembiayaan yang dapat menyalurkan skim kredit lunak dapat menjadi alternatif dalam memenuhi nafkah dan peningkatan produktivitas usaha yang dilakukan rumah tangga nelayan. Pentingnya kredit pada komunitas nelayan ini dilaporkan oleh Widodo (2011) bahwa kemiskinan yang terjadi banyak disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan (*financial capital*). Keberhasilan perkreditan pada komunitas nelayan telah dibuktikan oleh banyak lembaga pembiayaan mikro, termasuk koperasi, misalnya peran yang dilakukan oleh KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan Kabupaten Subang, selain menyediakan skim untuk simpan pinjam juga memfasilitasi kredit penyediaan rumah bagi nelayan (Fatchiya dan Muflikhati, 2006).

Kemiskinan pada masyarakat nelayan boleh dikatakan sebagai kemiskinan yang sangat akut dan sulit diberantas, hal ini dikarenakan struktur sosial masyarakatnya yang mengarah pada masyarakat desa dua kelas, sehingga menyulitkan untuk dilakukan perubahan dalam jangka pendek. Berbagai strategi mesti diterapkan termasuk strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan diarahkan pada perbaikan taraf hidup atau kesejahteraan penduduk melalui peningkatan pelayanan atau penyediaan fasilitas publik seperti penyediaan sarana dan prasarana transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, dll.), sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, petugas kesehatan, perbaikan gizi), sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, guru, peralatan pendidikan, dll.), penyediaan air bersih, pengadaan listrik, perbaikan permukiman dan penyediaan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Strategi partisipatif adalah strategi penanggulangan kemiskinan dengan mengepankan peran masyarakat miskin dalam menentukan kebutuhannya sendiri, yang pada dasarnya merupakan perpaduan antara pendekatan *bottom-up* dengan *top-down*. Melalui strategi ini, pilihan pembangunan betul-betul didasarkan kepada kebutuhan masyarakat sasaran dan diharapkan tumbuh rasa memiliki terhadap hasil-hasil yang telah dibangun karena adanya partisipasi warga yang tinggi. Peranan partisipasi warga sangat ditonjolkan dalam strategi ini

mulai dari identifikasi kebutuhan (analisis masalah dan kebutuhan), penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan, yang pada dasarnya merupakan daur (siklus) kegiatan pembangunan. Hasil akhir dari program adalah diharapkan munculnya kepedulian dari warga masyarakat terhadap masalah-masalah dilingkungannya dalam wujud kemauan berkorban (partisipasi) demi kepentingan bersama dan adanya peningkatan (perbaikan) taraf hidup.

Strategi terpadu adalah strategi yang dilaksanakan dengan memadukan ketiga strategi di atas yaitu dengan menginginkan adanya pertumbuhan karena memang dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan, namun seiring dengan itu perlu dilakukan pula peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat miskin. Adapun untuk implementasinya akan lebih baik apabila dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan demikian maka akan tumbuh pula rasa memiliki terhadap hasil-hasil yang telah dicapai karena adanya partisipasi tersebut. Strategi terpadu ini pada dasarnya lebih menekankan pula kepada upaya pemberdayaan dengan sasaran akhir dari program berfokus kepada tumbuhnya kemandirian masyarakat sasaran secara bertahap. Meskipun sasaran akhirnya berupa peningkatan pendapatan, namun untuk menerapkan strategi ini yang pertama kali harus ditumbuhkan adalah adanya kesadaran tentang pentingnya penerapan nilai-nilai dalam masyarakat termasuk dalam menjalankan organisasi, menjaga kebersamaan, dan menumbuhkan kepedulian diantara sesama warga.

Selain menerapkan strategi di atas, berbagai upaya pengembangan masyarakat pesisir akan lebih efektif apabila dibarengi dengan pemeliharaan terhadap *social capital*, sebagaimana diyakini oleh Isham (2000). *Social capital* pada dasarnya mencakup institusi, hubungan, sikap, dan nilai yang mengarahkan dan menggerakkan interaksi antar orang untuk berkontribusi secara lebih produktif. Mendasarkan pada pemahaman *social capital* dimaksud, maka pada dasarnya *social capital* terdiri dari empat unsur utama, yakni mencakup : *norms*, *reciprocity*, *trust*, dan *network*. Untuk masyarakat miskin di wilayah pesisir berdasarkan hasil penelitian Widodo (2012) di Desa Karang Agung Kabupaten Tuban, pemanfaatan *social capital* pada umumnya masih didasarkan pada ikatan kekerabatan, kekeluargaan dan pertetanggaan, dalam hal ini *social capital* ini masih terbatas digunakan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek (tujuan konsumsi) bukan mengarah pada pemenuhan kebutuhan jangka panjang (tujuan produktif).

Berdasarkan pada karakteristik sumberdaya alam dan kondisi sosial ekonomi yang ada di wilayah pesisir, maka arahan alternatif strategi pembangunan yang dapat dilakukan, adalah: (1) untuk desa terisolasi, hendaknya dengan menekankan pada pengkombinasian antara strategi partisipatif dengan strategi kesejahteraan, pendekatan ini dinilai cocok karena kemiskinan di desa terisolasi ini sangat akut sehingga harus dimulai dari menumbuhkan partisipasi warga dalam pembangunan serta difasilitasi berbagai kebutuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya secara bertahap, masyarakat akan terdorong pertumbuhan ekonominya melalui perluasan pasar dari produk yang dihasilkan oleh desa yang bersangkutan, (2) untuk desa pantai, hendaknya menerapkan strategi terpadu yakni memadukan antara strategi: pertumbuhan, kesejahteraan, dan partisipatif. Pada desa ini, dinilai telah siap ditumbuhkan perekonominya melalui pendekatan pertumbuhan karena telah tersedianya pasar produk serta aksesibilitas lokasi yang lebih baik. Namun dalam penerapan strategi pertumbuhan ini, tetap pula diperlukan penekanan pada partisipasi warga serta penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian analisis di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal yang merupakan karakteristik wilayah pesisir Kalimantan Barat serta strategi pembangunan yang dapat dilakukan, sebagai berikut:

1. Masyarakat desa pesisir Kalimantan Barat dapat dibedakan menjadi dua golongan komunitas yaitu yang masih merupakan representasi dari komunitas desa terisolasi dan komunitas desa pantai.
2. Problematika paling utama dalam masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kalimantan Barat adalah berkaitan dengan struktur sosialnya yang mengarah pada terjadinya polarisasi sosial (struktur masyarakat dua kelas). Hal ini menunjukkan telah terjadinya ketimpangan bahkan mungkin keterbelakangan.
3. Sumber daya alam pesisir Kalimantan Barat dinilai sangat kaya yang dicirikan oleh bentuk pantainya yang landai serta jenis lahan pesisir yang cukup subur sehingga sangat memungkinkan dilakukan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup pesisir memungkinkan pula dilakukan penganekaragaman sumber pendapatan masyarakat nelayan, tidak hanya terbatas pada sektor kelautan dan pertanian semata, tetapi juga mencakup sektor non pertanian.
4. Berdasarkan pada karakteristik sosial ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki, maka beberapa alternatif strategi pembangunan yang dapat dilakukan, adalah: (1) untuk desa terisolasi, strategi pembangunan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkombinasikan antara strategi partisipatif dengan strategi kesejahteraan, dan (2) untuk desa pantai, hendaknya menerapkan strategi terpadu yakni memadukan antara strategi: pertumbuhan, kesejahteraan, dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik 2012. Kalimantan Barat dalam Angka Tahun 2012. BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Barat 2002. Identifikasi Aktivitas Peningkatan Pendapatan Bagi Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Lokasi MCMA. Proyek Pengembangan Kawasan Pesisir/Bagian Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (MCMRP) Provinsi Kalimantan Barat.
- Crescent 2001. Laporan Penyusunan Rencana Perbaikan Ekosistem Melalui Pelibatan Peran Masyarakat Pulau-pulau Kecil di Pulau Karimata (Kalimantan Barat). Kerjasama Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Regional dan Pemberdayaan Masyarakat (Crescent). Jakarta.
- Susilo, E. 2010. Kajian Struktur Sosial Masyarakat Nelayan di Ekosistem Pesisir. Wacana, 13(2): 366-380.
- Fatchiya, A. dan I. Miflikhati 2006. Peran KUD Mina dalam Pembangunan Masyarakat Pesisir (Kasus di KUD Mina Fajar Sidik di Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat). Buletin Ekonomi Perikanan, 6(3): 50-58.

- Febrianto, P.T. dan Rahardjo 2005. Eksploitasi Hubungan Pandega-Juragan dalam Modernisasi Perikanan Tangkap di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. *Sosiosains*, 18(2): 325-339.
- Hariato 2007. Peranan Pertanian dalam Ekonomi Perdesaan. dalam Prosiding Seminar Nasional, *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat*, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian.
- Isham, J. 2000. Can Investments in Social Capital Improve Well-Being in Fishing Communities ? A Theoretical Persepective for Assessing the Policy Options. *IIFET 2000 Proceeding*.
- Ismail, Z. 2001. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir. dalam Ismail Z. (Eds), *Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Jakarta.
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah Persepektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Hidup*. LP3ES. Jakarta.
- King C. and Z. Adeel, 2002. *Strategies for Sustainable Coastal Management in Asia and the Pacific-Perspectives from a Regional Initiative*. *Global Environmental Change* 12 (2002): 139 – 142.
- Nadjib, M. 2001. Aspek Sosial Budaya dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir. dalam Ismail Z. (Eds), *Pengembangan Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Berkelanjutan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Jakarta.
- Pollnac R.B. 1988. Karakter Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil. dalam Cernea M.M. (Eds), *Mengutamakan Manusia di Dalam Pembangunan (Variabel-variabel Sosiologi di Dalam Pembangunan Pedesaan)*. Publikasi Bank Dunia. Terjemahan oleh Basilius Bengo Teku, IU-Press. Jakarta.
- Rahardjo 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Cetakan ketiga. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Satria, A. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cetakan Pertama. Cidesindo. Jakarta.
- Suyadi dan J. Sudrajat, (2009). Potensi dan Kendala Pengembangan Lahan Rawa Pasang Surut. *Agripura (Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura)*, 4(2): 535-549.
- Widodo, S. 2011. Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin di Daerah Pesisir. *Makara, Sosial Humaniora*, 15(1): 10-20.
- Widodo, S. 2012. Penguatan Modal Sosial untuk Pengembangan Nafkah Berkelanjutan dan Berkeadilan. Makalah dalam Prosiding Seminar Nasional: *Membangun Negara Agraris yang Berkeadilan dan Berbasis Kearifan Lokal*, diselenggarakan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 19 April 2012.